

SKRIPSI

**PRINSIP NON DISKRIMINASI DI BIDANG AGAMA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**



PHERDO BRITHAN SIBARANI

NIM : 1610211310080

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

2023

LEMBARAN PENGESAHAN

**PRINSIP NON DISKRIMINASI DI BIDANG AGAMA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

Diajukan oleh

PHERDO BRITHAN SIBARANI

NIM. 1610211310080

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai penyelesaian yudisium

Nomor : 498/UNS.1.11/sp/2023
Tanggal : 01 AUG 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Pherdo Brithan Sibarani
NIM : 1610211310080
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung, 1 Oktober 1997
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

HAK SETIAP ORANG MENCALONKAN SEBAGAI PEMIMPIN TANPA ADANYA ISU AGAMA DALAM PEMILU/PILPRES

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



PHERDO BRITHAN SIBARANI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3305648 Laman : <https://fh.ulm.ac.id/>

Nomor : 1493/UN8.1.11/SP/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas naskah skripsi
Perihal : UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Kepada

Yth. Bapak Ibu

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1 Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. | (Ketua Sidang) |
| 2 Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. | (Sekretaris) |
| 3 Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. | (Pembimbing Ketua) |
| 4 Lies Ariany, S.H., M.H. | (Pembimbing) |
| 5 Risni Ristiawati, S.H., M.H. | (Anggota) |

di-

Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa Ujian Skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Pherdo Brithan Sibarani

NIM : 1610211310080

Judul : Hak Setiap Orang Mencalonkan Sebagai Pemimpin Tanpa Adanya Isu Agama Dalam Pemilu/Pilpres

Dijadwalkan pada :

Hari/Tgl : Selasa, 20 Juni 2023

Waktu : 09.00 - 11.00 Wita

Tempat : Ruang Sidang Skripsi Fakultas Hukum ULM

Acara : Ujian Penulisan Skripsi

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

Catatan:

1. Undangan dan naskah ujian wajib diserahkan kepada dosen penguji skripsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian skripsi dilaksanakan.
2. Peserta Wajib menghubungi dosen di Hari H Pagi untuk mengingatkan jadwal sidang melalui chat *Whatsapp*.

HALAMAN PERSETUJUAN

**HAK SETIAP ORANG MENCALONKAN SEBAGAI
PEMIMPIN TANPA ADANYA ISU AGAMA
DALAM PEMILU / PILPRES**

Diajukan Oleh :


**PHERDO BRITHAN SIBARANI
NIM : 1610211310080**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada tanggal

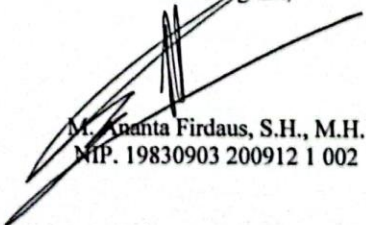
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Akhmadi Yusran, SH., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001


Lies Afriany, S.H., M.H.
NIP 19800303 200501 2 003

Diketahui,
Banjarmasin, 12 Juni 2023
Ketua Program,


M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PRINSIP NON DISKRIMINASI DI BIDANG AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

PHERDO BRITHAN SIBARANI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang Prinsip Non Diskriminasi Di bidang Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis tentang prespektif hukum dan HAM dalam pilkada di Indonesia. Penulisan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kecabangan hukum, sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Menurut penelitian skripsi ini, diperoleh hasil bahwa *pertama*, bahwa dalam pasal UUD 1945 pasal 29 ayat (2) dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Negara menjamin tiap-tiap penduduk bebas untuk memilih agamanya sendiri, kita juga bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik yang dijelaskan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 23 ayat (1) yang isinya mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. **Kedua**, seseorang calon kepala daerah harus memeluk salah satu agama dari enam Agama yang disahkan di Indonesia, karena Indonesia sendiri sesuai dengan nilai pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : Negara, dan Agama, dan Kepala Daerah

RINGKASAN

Prinsip Non Diskriminasi Di bidang Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah

(Pherdo Brithan Sibarani : 2016, 49 Halaman)

Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses bagi seseorang untuk dapat mengisi atau menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh KPU yang bersifat tetap, dan mandiri. Dalam undang-undang yang mengatur pemilu terdapat hal-hal yang dilarang bagi setiap orang yang mengikut maupun turut serta dalam pemilu. Dalam beberapa kasus ada hal-hal yang dilarang dalam pemilu salah satunya kasus ini, isu agama menjadi salah satu faktor dalam pemilihan umum. Isu agama dalam politik di Indonesia menjadi strategi untuk mendapatkan suara dan menduduki sebuah jabatan, dalam politik isu agama menjadi bukti nyata menguatnya solidaritas untuk menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang tidak bolehnya ada kepemimpinan yang berbeda keyakinannya dengan aksi yang mengindikasikan mobilisasi massa dalam rangka kepentingan politik tertentu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandangan sila pertama pancasila dalam pemilu di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tentang perspektif hukum dan HAM dalam pilkada di Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah keaburan hukum, sehubungan dengan tipe, sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep yang dikemukakan ahli hukum di dalam pendapat mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis dari penulis, dapat disimpulkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, ada juga larangan yang berlaku yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu.
2. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak setiap orang mencalonkan sebagai pemimpin, negara menjamin kebebasan bagi penduduk untuk memilih agama dan kepercayaannya tanpa ada paksaan kita juga bebas memiliki keyakinan politik kita seperti yang sudah di jelaskan dalam UU nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 23 ayat (1), adapun larangann yang ditetapkan terdapat di UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 28 ayat (2), UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 280 ayat (1) huruf C, dan dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu dalam pasal 69 ayat (1) huruf C.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur sepantasnya dipanjatkan kepada Tuhan Yesus, karena atas seluruh berkat dan rahmatnya, penulisan Hukum / skripsi dengan judul “PRINSIP NON DISKRIMINASI DI BIDANG AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih yang teramat sanagat kepada kedua orang tua penulis yaitu yang tercinta ayahanda Makmur Sibarani dan ibunda Silis Ganti yatini dengan pengorbanan yang tulus dan kasih saying selalu mendoakan, mendukung, memberikan perhatian serta kepercayaan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Lies Arianty, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah membantu memberikan bimbingan, arahan, dan solusi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

5. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan Nandez, Alvin, Iqbal, Adi Garoe, Madan, Wawan, dan lain-lain.
6. Teman team futsal Barsel Fc Antung, Paluy, Lana, Ghani, Bocil.
7. Teman Kerja Dirga, Hiskia, Veven, Jose.
8. Semua teman-teman khususnya angkatan 2016.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HAAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAJ SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
RINGKASAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Teori Tentang Demokrasi.....	10
B. Hak Asasi Manusia	21
C. Pemilihan Umum	23
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Pandangan Sila Pertama Pancasila Dalam Pemilihan Umum di Indonesia	30
B. Isu Agama Dalam Pilkada di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Hak AsasiManusia (HAM)	42
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, R. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, Rozali. 2002. *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- al-Buthi, R., & Said, M. 2005. *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Press.
- Amin, S.M. 1981. *Demokrasi Selayang Pandang*. Jakarta: Pradyna Paramita.
- Azra, A. 2003. *Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Barry, N. P. 1981. *An Introduction to Modern Political Theory*. New York: St. Martin’s Press.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fatwa.M.A. 2005. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dharmapena.
- Herdiawanto, H. 2010. *Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Hidayat, K. 2008. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, Komaruddin. 2000. *Pendidikan Kewargaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, N. 2014. *Ilmu Negara, Cetakan ke-6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismatullah, D., & Sahid Gatra, A. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jumadi. 2012. *Refleksi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Makassar: Alauddin University press.
- Kansil, C. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.

- Mahfud MD, M. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahmud MD, M. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'ood, M. 1999. *Negara, Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meyer, T. 2003. *Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*. Jakarta: Friedrich-Erbert-Stiftung.
- Milne, A. 1986. *Human Rights and Human Diversity, Houndmills, Basingstoke*. Hampshire dan London: Macmillan.
- Puslit. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Rosyada, dkk. 2011. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsih dkk. 2008. *Moral Pancasila*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sukaya, Endang Zaelani, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan, Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sumarsono, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarso, & Anis, K. 2018. *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Thaib, D. 1993. *Implementasi System Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*. Jakarta: Prapanca.
- Zainuddin, A. 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet

- Wikipedia, Pemilihan umum, 2020, <https://id.wikipedia.org>.diaksespadataanggal 3 Februari 2020

CNN Indonesia, Saat Isu SARA Benamkan Kepuasan Publik pada Kerja Ahok, 2019, <https://m.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 5 Februari 2021

Wikipedia, Demokrasi Di Indonesia, 2021, <https://id.wikipedia.org> Di akses pada tanggal 29 Juni 2021

C. Jurnal

Bactiar, F. R. 2014. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi". *Jurnal Politik Profetik Vol. 3, No. 1.*, hlm. 2.

Kurniawan, B. 2018. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi". *Jurnal Sosiologi Agama, Vol.12 No. 1*, hlm. 134.

Simamora, J. 2014. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding, Vol. 3 No. 1*, hlm 6.

Thalhah, H. 2009. "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen". *Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3*, hlm 414-415.